

Berpotensi Karhutla, Tapi Anggaran Lahan Gambut Terpangkas Corona



<https://kalsel.prokal.co/read/news/33632-berpotensi-karhutla-tapi-anggaran-lahan-gambut-terpangkas-corona>

Persoalan lahan gambut di Kalsel nampaknya masih berlanjut. Ke depan, Kalsel bakal dihadapkan dengan musim kemarau. Artinya, potensi terjadi kebakaran lahan yang berawal dari titik api di lahan-lahan gambut bakal terjadi lagi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai stakeholder yang berkepentingan mengurus lahan gambut di Banua, harus kerja ekstra keras. Selain merutinkan program pembasahan lahan gambut yang sangat luas, mereka juga harus menyesuaikan kondisi dengan anggaran yang minim. Tahun ini, semua anggaran kegiatan wajib dipangkas hingga 50 persen untuk penanggulangan Covid-19 di Kalsel. Tak terkecuali, anggaran untuk pengendalian lahan gambut di Kalsel juga terpangkas.

Hanifah menuturkan dengan anggaran yang terpangkas untuk pandemi Covid-19, otomatis pihaknya juga harus berupaya semaksimal mungkin mengerahkan kemampuan. Intinya, kami berupaya agar program-program penanganan lahan gambut di Kalsel tetap berjalan. Selebihnya, kami akan merangkul masyarakat Kalsel agar bisa saling bahu-membahu menangani lahan gambut yang sering rawan memunculkan titik api di musim kemarau. Dengan anggaran yang terpangkas tersebut, diakui Hanifah ada beberapa rencana yang terpaksa ditunda dulu. Antara lain,

kami tunda dulu pembuatan sumur bor tambahan dan sekat-sekat kanal di sejumlah lokasi vital. Selain itu, beberapa program evaluasi juga sebisa mungkin kami buat seefisien mungkin.

Tahun ini, anggaran untuk penanganan lahan gambut di Kalsel hanya tersedia Rp2,7 miliar, setelah dirasionalisasi untuk penanganan Covid-19. Kami bertekad tetap mengerahkan segala daya dan upaya dalam menangani lahan gambut Kalsel. Dana minim, bukan jadi penghalang bagi kami untuk tetap kerja keras. Sementara itu, Sayuti Enggok, Sekretaris Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalsel tak menampik dana minim bisa jadi kendala dalam menjalankan kinerja. "Namun, kami juga tetap komitmen bersinergi dengan DLH Kalsel. Karena, walau bagaimanapun harus ada yang mau turun tangan mengurus lahan gambut di Kalsel. Supaya, setidaknya bisa meminimalisir dampak kabut asap yang nanti bakal ditimbulkan di musim kemarau.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, Berpotensi Karhutla, Tapi Anggaran Lahan Gambut Terpangkas Corona.
2. <https://www.mongabay.co.id>, Tantangan Pengendalian Karhutla pada Masa Pandemi.

Catatan:

Definisi Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja.

Tugas dan Fungsi

1. KLHK:

Mengingat KLHK adalah gabungan kehutanan dan lingkungan tugas baru ditambah untuk menangani kebakaran di lahan selain kawasan hutan, memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha bila tidak memiliki SDM, sarpras dan tidak melaksanakan pengendalian kebakaran, koordinator pemulihan lingkungan hidup akibat Karhutla, meningkatkan koordinasi dan memberikan bantuan teknis untuk kerja sama regional dan internasional yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup akibat Karhutla;

2. Menristekdikti:

penambahan tugas kementerian di bidang pendidikan tinggi sehingga tugas terkait Karhutla adalah mengupayakan langkah agar proses kegiatan pendidikan tidak terganggu dengan penyediaan bantuan dana bagi masyarakat yang terkena dampak Karhutla, dan mendayagunakan para dosen dan mahasiswa fakultas kedokteran berpartisipasi membantu penanganan masalah kesehatan di daerah terkena dampak Karhutla;

3. Gubernur:

mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian Karhutla, melaporkan pelaksanaan pengendalian Karhutla ke Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan- Penambahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BMKG Perubahan secara mendasar terkait penambahan jumlah institusi yang dilibatkan. Institusi-institusi yang baru dimasukkan ini terkait peran dan fungsinya dalam rangka menata aspek sosial terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Selain itu terkait dengan konflik lahan maupun pembangunan infrastruktur. Akan tetapi yang terkait dengan pembangunan desa belum termasuk dalam institusi pemerintah yang terlibat dalam pengendalian Karhutla. Secara mendasar bahwa ke depan untuk pengendalian Karhutla yang berkelanjutan semetinya melibatkan pemerintahan desa.